



ANTARA KETURUNAN DAN KEPEMIMPINAN: MENILIK DINASTI POLITIK KOTA MAKASSAR MELALUI LENSА ANTROPOLOGI POLITIK DALAM KONTEKS CALON PEMIMPIN DAERAH

Mohammad Taslim Lapungge¹, Ainun Arsi², St. Junaeda³

Universitas Negeri Makassar
Mohammadtaslim995@gmail.com

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords: *Dinasti Politik, Pemimpin Daerah, Antropologi Politik, Kota Makassar*

Abstract: : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dinasti politik di Kota Makassar. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber yang relevan mengenai dinasti politik, kepemimpinan daerah, antropologi politik, dan konteks politik Kota Makassar. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pola kepemimpinan berbasis keturunan yang dominan dalam dinasti politik di Kota Makassar, dengan faktor-faktor seperti kekuatan politik keluarga, dukungan politik lokal, dan kebiasaan politik masyarakat yang mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik. Dampak dari dinasti politik ini terlihat dalam sistem politik dan demokrasi Kota Makassar, di mana terdapat keterbatasan akses bagi calon-calon non-dinasti dan potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinasti politik di Kota Makassar dan memberikan kontribusi untuk pembahasan lebih lanjut mengenai upaya perbaikan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.*

PENDAHULUAN

Isu mengenai pemilihan pemimpin daerah kembali menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia, mengingat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang dikenal dengan sebutan pemilu (pemilihan umum). Sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang waktu pemungutan suara, tepatnya dalam pasal 201 ayat 8 disebutkan bahwa pemungutan suara secara serentak nasional untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 (Dohu, Thomas. 2022).

Pada pergelaran pesta demokrasi atau pemilu serentak tersebut kembali akan menjadi ujian yang sesungguhnya terhadap bangsa Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi. Pasalnya, pada pemilu-pemilu sebelumnya masih banyak hambatan, tantangan, dan anacaman yang dihadapi, baik dalam konteks masalah internal ataupun eksternal, dalam pemerintah atau penyelenggara pesta demokri yang dilaksanakan 5 tahun sekali tersebut (Harsono, Y,B. 2023).

Dikutip dari (Bawaslu. 2020) ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pemilihan umum, seperti yang disampaikan oleh Abhan selaku ketua Bawaslu periode 2017-2022. Abhan mengatakan bahwa setiap masa pemilu tiba, kehidupan kebangsaan jadi penuh potensi bahaya, dan taruhannya adalah kualitas demokrasi serta eksistensi integras bangsa. Eks ketua Bawaslu selama satu periode tersebut kemudian mengatakan bahwa kita harus berkaca pada penyelenggaraan pilkada 2015, 2017, dan terakhir 2018 serta pemilu tahun 2014 dan 2019, menunjukkan ada dinamika politik yang semakin tajam membelah rakyat dan menyeret pada ancaman potensi perpecahan. Praktik politik identitas yang memicu sentimen keagamaan telah mengakibatkan polarisasi yang merusak demokrasi. Lebih dari itu, Abhan menyatakan bahwa fenomena ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan politik bangsa sedang mengalami kemunduran atau penurunan kualitasnya. Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa perbaikan sistem keadilan pemilu diperlukan, termasuk melalui politik hukum dalam merancang sistem penegakan hukum pemilu (Agusta, Rama. 2020).

Selain permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Dalam konteks politik di Kota Makassar, terdapat fenomena yang menarik perhatian, yaitu masih adanya dinasti politik yang berpengaruh dalam pemilihan pemimpin daerah. Dinasti politik merupakan fenomena umum yang telah lama hadir di banyak negara demokrasi modern (Suharto, D. G., dkk. 2017). Selanjutnya, mengutip dalam (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015) mengenai dinasti politik, dinasti politik merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang-orang tertentu yang masih terkait dalam ikatan keluarga. Dinasti politik merujuk pada kelompok atau keluarga politik yang menguasai posisi kekuasaan secara berurutan. Dinasti politik sering kali melibatkan keturunan dari figur politik yang telah menjabat sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam mengenai pengaruh keturunan terhadap kepemimpinan dan implikasinya pada proses demokrasi.

Dengan melihat fenomena tersebut, adanya penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam dinasti politik di Kota Makassar melalui lensa antropologi politik dalam konteks calon pemimpin daerah. Tujuannya adalah mengidentifikasi dinasti politik yang ada, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinasti politik, dapat ditemukan alternatif solusi yang



memungkinkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses politik di Kota Makassar.

Dalam konteks dinasti politik, ada beberapa dampak atau potensi yang ditimbulkan. Sama halnya seperti yang terjadi pada masa orde baru yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang mencolok adalah liberalisasi politik di tingkat nasional dan lokal, yang menandakan pergeseran sistem politik Indonesia dari yang non-demokratis menjadi demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa politik dinasti memiliki peran penting dalam membentuk transformasi politik yang lebih inklusif dan demokratis di negara ini selama periode tersebut (Siregar, M. T., dkk. 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinasti politik dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem politik yang ada.

Salah satu kebaruan utama dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan antropologi politik dalam konteks dinasti politik di tingkat daerah. Pada penelitian sebelumnya lebih cenderung memfokuskan terhadap dinasti politik di tingkat nasional, penelitian ini secara khusus menyoroti dinasti politik yang terkait dengan pemilihan pemimpin daerah di Kota Makassar. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana dinasti politik beroperasi dan mempengaruhi sistem politik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian berfokus pada implikasi dinasti politik terhadap sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar. Penelitian sebelumnya banyak yang lebih berfokus pada deskripsi fenomena dinasti politik, tetapi penelitian ini memperluas analisisnya dengan mengevaluasi dampak dinasti politik terhadap tata kelola pemerintahan daerah, perwakilan politik yang demokratis, dan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinasti politik memengaruhi sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahmat, S.M. 2019), dinasti politik didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang melibatkan hubungan kekerabatan dalam mengatur masyarakat, baik melalui struktur maupun dalam pemisahan yang jelas antara kekuasaan politik dan kehidupan masyarakat. Sementara menurut (Fitri, A. 2019), dalam artian tradisional, dinasti politik mengacu pada praktik penguasa yang berupaya menempatkan anggota keluarga, saudara dan kerabat dekatnya ditempatkan pada posisi strategis dalam pemerintahan, dengan tujuan untuk membangun kerajaan politik dalam pemerintahan.

Selanjutnya, pengertian pemimpin menurut (Khairunnisa, 2018), Pemimpin adalah seseorang yang melakukan segala upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompoknya, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti pemimpin tersebut. Dalam hal ini, kepemimpinan melibatkan dorongan dan motivasi terhadap individu dan kelompok untuk berusaha dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. Peran kepemimpinan memiliki tingkat kecocokan yang tepat dan sangat penting dalam suatu organisasi.



Dalam studi yang dilakukan oleh (Audri, J. F. 2021) mengemukakan bahwa antropologi politik merupakan penerapan metode dan pendekatan antropologi dalam mempelajari fenomena politik. Melalui pendekatan ini, antropologi politik menitikberatkan pada pemahaman tentang pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang terkait dengan proses politik. Tujuannya adalah untuk mencapai sintesis baru dengan menggunakan analisis struktur yang telah diperbarui serta memahami dinamika hubungan sosial yang ada dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan topic yang dibahas. Menurut (Habsy, B.A. 2017) studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam materi integral. Studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber-sumber yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dari literatur akan dianalisis dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara informasi yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Analisis ini dilakukan secara mendalam dan kontekstual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dinasti politik di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian literatur ini, penulis mengidentifikasi sejumlah sumber yang relevan dengan dinasti politik, kepemimpinan daerah, antropologi politik, dan konteks politik Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel/jurnal akademik, riset, dan sumber informasi lainnya yang relevan untuk memahami fenomena dinasti politik di Kota Makassar.

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa dinasti politik merupakan fenomena yang signifikan di Kota Makassar. Dinasti politik dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai pola kepemimpinan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga politik. Beberapa keluarga bangsawan telah mendominasi panggung politik di Kota Makassar selama beberapa dekade, menjadikan dinasti politik sebagai salah satu karakteristik penting dalam dinamika politik lokal.

Fenomena politik kekerabatan bermula dari beberapa keluarga, tetapi saat ini kekerabatan Muhammad Yasin Limpo menjadi yang paling dominan dengan jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik paling banyak dibandingkan dengan keluarga lainnya. Tabel berikut memperlihatkan bahwa fenomena politik kekerabatan tidak hanya terjadi dalam satu keluarga, tetapi melibatkan beberapa keluarga.



KELUARGA	NAMA/HUBUNGAN KEKERABATAN	JABATAN	PARTAI PENGUSUNG	JABATAN DALAMPARTAI
Muhammad Yasin Limpo*	1.Syahrul Yasin Limpo/anak Yasin Limpo	-Gubernur Sulawesi Selatan(2008-1013 dan 2013-2018). -Wakil Gubernur (2003-2008) -Bupati Gowa (1994-2002)	PDK,PAN, PDIP	Ketua DPD Golkar Sulsel (2009-2014)
	2.Sitti Nurhayati/ IstriM Yasin Limpo	-Anggota DPRD Sul-Sel (1987-1992, 1992-1997, 1997-1999) -Anggota DPR RI (2004-2009)	Partai Golkar	
	3. Tenri Olle/anak Yasin Limpo/Kakak Gubernur	-Anggota DPRD Gowa (2004-2009) -Anggota DPRD Sulsel (2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD GolkarGowa
	4. Ichsan Yasin Limpo/Anak M Yasin Limpo/ adik Gubernur	-Anggota DPRD Sulsel (1999-2004) -Bupati Gowa (2005-2010 dan2010-2015)	Partai Golkar	Bendahara PartaiGolkar Sulawesi Selatan (2009-2015)
	5. Haris Yasin Limpo/ Anak M Yasin Limpo/adik Gubernur	Anggota DPRD Kota Makassar(2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD GolkarKota Makassar
	6. Dewi Yasin Limpo/anak M. Yasin Limpo	Mantan caleg DPR RI 2009	Partai Hanura	Ketua DPD HanuraSulsel
	7. Indira Thita Chundra/anak Syahrul Yasin Limpo	Anggota DPR RI (2009-2014)	PAN	Wakil Sekjen PAN2010-2015
	8. Adnan Purichta/anak Ichsan Yasin Limpo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan(2009-2014)	Partai Demokrat	
Qahhar Muzzakar**	1.Aziz Qahhar Muzzakar/anak Qahhar Muzzakar	Anggota DPD RI (2004-2009 dan2009-1014)		
	2.Buhari Qahar Muzzakar/adik Aziz Muzzakar	Anggota DPRD Sulawesi Selatan(2004-2009 dan 2009-2014)	PAN	Sekretaris PANSulsel
	3.Andi Muzzakar/adikAziz Muzzakar	Bupati Luwu (2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD GolkarLuwu
Arief Sirajudin***	1.Ilham Arief Sirajuddin/anak Arief Sirajuddin	-Anggota DPRD Sulawesi Selatan(1999-2004) -Walikota Makassar (2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Demokrat	Ketua DPD Partai Demorata Sulawesi Selatan
	2.Andi Rahmatika Dewi/Keponakan IlhamArief	Anggota DPRD Kota Makassar(2009-2014)	Partai Golkar	Wakil SekretarisGolkar Kota Makassar
Andi IdrisGaligo	1.Andi Idris Galigo	Bupati Bone (2003-2008 dan2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD GolkarBone, keluar dari Golkar karena konflik pilkada 2012
	2. Muh. Irsan Idris Galigo/anak Idris Galigo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan(2009-2014)	Partai Golkar	Ketua Soksi Kab.Bone, men-jadi caleg Nasdem 2014
Amin Syam	Amin Syam	Gubernur Sulawesi Selatan (2003 - 2008)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel
	Imran Tenri Tatta/anak Amin Syam	Anggota DPRD Makassar (2009 - 2014)	Partai Golkar	Wakil Sekretaris Partai Golkar KotaMakassar
Keluarga	Nama/Hubungan Kekerabatan	Jabatan	Partai Pengusung	Jabatan dalam Partai
Ibrahim Rewa	Ibrahim Rewa	Ketua DPRD Takalar (1999-2002) Bupati Takalar (2002-2007 dan 2007-2012)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
	Natsir Ibrahim/anak Ibrahim Rewa	Anggota DPRD Takalar (2009 -2012) Wakil Bupati Takalar (2012-2017)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
Padjalangi	Andi Yaqkin Padjalangi	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2004 - 2009 dan 2009 - 2104)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan
	Andi Fashar Padjalangi / adik Yaqkin Padjalangi	Wakil Bupati Bone (2003-2008) Bupati Bone (2013 -2018)	Partai Golkar	
	Andi Rio Idris Padjalangi/ adik Yaqkin Padjalangi	Anggota DPRD Sulsel (2009 - 2014)	Partai Golkar	Wakil Bendahara Partai Golkar Sulawesi Selatan



Nurdin Halid	Nurdin Halid	Mantan anggota DPR RI	Partai Golkar	
	A. Kadir Halid/adik NurdinHalid	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999 – 2004 dan 2009 – 2013)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan

Sumber: Diolah dari berbagai berita media

* Muhammad Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa, Bupati Maros dan Bupati Takalar

** Qahhar Muzakkar adalah tokoh DI/TII

*** Kol (Purn) H.M. Arief Sirajuddin adalah mantan Bupati Gowa

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik di Kota Makassar adalah faktor budaya. Masyarakat Kota Makassar memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat dalam menghargai keluarga dan keturunan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keluarga politik dapat mempertahankan pengaruh dan dukungan politik dari generasi ke generasi. Selain faktor budaya, faktor kekuasaan dan sumber daya politik juga memainkan peran penting dalam memperkuat dinasti politik. Keluarga politik yang merupakan keturunan bangsawan yang memiliki kontrol atas sumber daya politik seperti keuangan, jaringan politik, dan akses ke institusi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam konteks politik Kota Makassar.

Namun, dampak dari dinasti politik terhadap sistem politik dan demokrasi di Kota Makassar masih menjadi perdebatan yang kompleks. Beberapa pihak berpendapat bahwa dinasti politik dapat mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil dan merugikan kemajuan demokrasi. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga politik dapat menghambat rotasi kepemimpinan dan perubahan yang diperlukan dalam sistem politik. Hal ini dapat mengurangi pluralisme politik dan memberikan sedikit ruang bagi suara-suara baru dan alternatif untuk muncul. Selain itu, dinasti politik juga dapat menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik pada keluarga politik tertentu, sehingga mempengaruhi distribusi kekuasaan yang sehat dan transparansi dalam kebijakan publik.

Di sisi lain, ada juga pendapat yang berargumen bahwa dinasti politik dapat membawa kestabilan politik dan kontinuitas kebijakan. Keluarga politik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam urusan politik dapat memberikan kestabilan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dianggap sebagai keuntungan dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh Kota Makassar. Selain itu, keluarga politik yang merupakan keturunan bangsawan memiliki ikatan emosional dan hubungan personal yang kuat dengan masyarakat dapat memperoleh dukungan dan legitimasi yang besar dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik.



Dalam kesimpulannya, studi literatur ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena dinasti politik di Kota Makassar. Dinasti politik telah menjadi bagian integral dari politik lokal, dengan keluarga politik yang mendominasi panggung politik dan meneruskan kepemimpinan dari generasi ke generasi. Faktor budaya, kekuasaan, dan sumber daya politik mempengaruhi keberlanjutan dinasti politik di kota ini. Namun, dampak dinasti politik terhadap sistem politik dan demokrasi masih diperdebatkan. Selain mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil, dinasti politik juga dapat menghambat rotasi kepemimpinan dan mempengaruhi transparansi dalam kebijakan publik. Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa dinasti politik dapat membawa kestabilan dan kontinuitas kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel/Jurnal:

Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91-111.

Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.

Khairunnisa, C. (2018). Eksistensi dan Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Aceh. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(1), 17-28.

Rahmat, S. M. (2019). Dinasti Politik Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Al Farabi.

Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. *PERSPEKTIF*, 10(2), 678-691.

Prosiding:

Suharto, D. G., Nurhaeni, I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. 2017. Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. In *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia* (pp. 30-49).



Website:

Agusta, Rama. 2020. *Permasalahan Pemilu Selalu Sama, Abhan : Taruhannya Kualitas Demokrasi*. URL: <https://bawaslu.go.id/id/berita/permasalahan-pemilu-selalu-sama-abhan-taruhannya-kualitas-demokrasi>. Diakses pada 30 Mei. 2023.

Dohu, Thomas. 2022. *Menghitung Durasi Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2022*. URL: <https://kab-manggarairabar.kpu.go.id/berita/baca/8068/menghitung-durasi-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024>. Diakses tanggal 30 Mei 2023.

Harsono, Y.B. 2023. *Hambatan, Ancaman dan Tantangan di Pemilu 2024*. URL: <http://beritamagelang.id/kolom/hambatan-ancaman-dan-tantangan-di-pemilu-2024>. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *Pengertian Politik Dinasti*. URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

Makalah:

Audri, J. F. (2021). *MAKALAH PEMBAGIAN ANTROPOLOGI HUKUM*.